

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG YURISPRUDENSI
MAHKAMAH AGUNG MENGENAI *FIRST TRAVEL***

(Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung No 3096 K/Pid.Sus/2018)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**REZA AL TEDI
NPM :1621020357**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG YURISPRUDENSI
MAHKAMAH AGUNG MENGENAI *FIRST TRAVEL***

(Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung No 3096 K/Pid.Sus/2018)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**REZA AL TEDI
NPM :1621020357**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dra. Firdaweri, M.H.I

Pembimbing II : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Yurisprudensi adalah putusan Mahkamah Agung pada pengadilan tingkat kasasi. Yurisprudensi Mahkamah Agung No 3096K/Pid.Sus/2018 adalah kasus *First Travel* dimana pihak *First Travel* dituntut oleh para jamaah umrah karena merasakan kejanggalan oleh para jamaah umrah pada saat hendak diberangkatkan umrah selalu ditunda-tunda hingga tahun berikutnya dan ada penambahan uang diluar ketentuan yang tidak masuk diperjanjian awal kontrak. Dalam proses dipengadilan negeri Depok Jawa Barat pihak *First Travel* terbukti melakukan tindak penipuan, penggelapan, dan pencucian uang dan barang-barang bukti dari *First Travel* diambil oleh negara. Adapun rumusan masalah: 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung tentang yurisprudensi perkara *First Travel*? 2. Bagaimana analisis Fiqh Siyasah tentang pertimbangan hukum hakim mengenai yurisprudensi Mahkamah Agung terkait *First Travel* ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mungkin tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung tentang putusan terkait *First Travel* dan untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah tentang pertimbangan hukum hakim mengenai yurisprudensi Mahkamah Agung terkait *First Travel*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis, menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data adalah metode dokumentasi dengan metode pengolahan data *editing*, *coding* dan *systematizing*. Kemudian data yang terkumpul diolah menggunakan pendekatan berfikir deduktif. Setelah semua data terkumpul, penulis menganalisis secara analisis isi (*Content Analysis*). Hasil dari penelitian ini adalah 1. yurisprudensi Mahkamah Agung No 3096K/Pid.Sus/2018 tentang perkara *First Travel* mengadili terdakwa Andika Surachman dan Anniesa Devitasari Hasibuan terbukti melakukan penipuan, penggelapan, pencucian uang dan dirampasnya bukti-bukti dari *First Travel* oleh negara, Keputusan hakim Mahkamah Agung tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dengan dasar hukum Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No 8 Tahun 2010 Bab II Pasal 3 sedangkan putusan tersebut dipandang oleh para jamaah tidak adil. 2. Sedangkan dalam analisis Fiqh Siyasah tentang yurisprudensi Mahkamah Agung tentang *First Travel* adalah penipuan, penggelapan, dan pencucian uang termasuk kategori *ghulul* dengan sanksi *Jarimah ta'zir* yang di mana hukuman ditentukan oleh ulil amri (pemerintah) atau hakim yang berdasarkan ijtihad dari peraturan yang ada telah sesuai dengan hukuman yang berlaku, sehingga sudah sesuai dengan Fiqh Siyasah namun dalam unsur keadilan tidak terpenuhi secara keseluruhan karena tidak ada ganti kerugian untuk para jamaah umrah.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Reza al-tedi
NPM : 1621020357
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwas kripsi yang berjudul "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung Mengenai *Fisrt Travel* (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung No 3096 K/Pid.Sus/2018)". Adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *foodnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Mei 2020

Penulis,



Nama: Reza Al-Tedi
NPM :16210200357



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarami, Bandar Lampung (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG
MENGENAI *FIRST TRAVEL* (Studi Yurisprudensi
Mahkamah Agung No 3096 K/Pid.Sus/2018)**

Nama Mahasiswa

Reza Al-Tedi

NPM

1621020357

Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas

Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Firdaweri, M.H.I.
NIP. 195509191982032004



Drs. H. Ahmad Jalaludin, S.H., M.M.
NIP. 195703051978031001

Ketua Jurusan,


Frenki, M. Si

NIP. 198003122009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarami Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skipri dengan judul **"ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENGENAI FIRST TRAVEL (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung No 3096 K/Pid.Sus/2018)"** Disusun Oleh Reza Al-Tedi NPM. 1621020357 Studi: Siyasah Syar'iyah Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada hari/tanggal : **Rabu, 22 Juli 2020**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H.

Penguji Utama : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Penguji I : Dra. Firdaweri, M.H.I

Penguji II : Drs. H. Ahmad Jalaludin, S.H., M.M. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Drs. H. Kurniadin, M.H.
NPM. 196210221993031002

MOTTO

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا
نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٨﴾

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

(QS. Shad (38): 26)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini persembahkan kepada :

1. Ayahku Nahrudin tersayang dan tercinta yang senantiasa mendukung, memberi semangat, yang selalu berjuang keras tanpa kenal rasa lelah untuk anaknya yang selalu menyayangi, selalu tak henti untuk mendoakanku atas kelancaran yang selama ini telah aku lalui.
2. Ibuku tercinta Evi Herliana tersayang yang selalu memberi semangat setiap saat. Terimakasih ibu karena telah memberi kasih sayang yang tiada habisnya, mengasihi, menyayangi, serta menemani aku dalam keadaan apapun, dan yang selalu mendoakan tiada hentinya untuk keberhasilanku kelak dan selalu menjadi penyemangat yang terbaik buat aku sehingga aku bisa sampai di tahap ini. Karena aku yakin tanpa do'a dan restu dari kedua orang tuaku takkan aku bisa sampai di tahap ini.
3. Adikku tersayang Habika Mak'ruf yang selalu mendukung dan menyemangati

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Reza Al-Tedi dilahirkan di Bandar Lampung- Lampung pada tanggal 28 maret 1998, merupakan anak pertama dari dua bersaudara putra pasangan Bapak Nahrudin dan Evi Herliana.

Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. TK Dewi Sartika, Bandar Lampung di selesaikan tahun 2002.
2. SDN 2 Sukabumi, Bandar Lampung di selesaikan tahun 2010.
3. SMP UTAMA 2 Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung di selesaikan tahun 2013.
4. Kemudian melanjutkan SMAN 12 Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus pada tahun 2016.
5. Tahun 2016, Penulis di terima sebagai mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Fakultas Syari'ah pada Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara) Melalui Jalur Seleksi PMA.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung Mengenai *First Travel* (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung No 3096 K/Pid.Sus/2018)" Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, S.E.,M.Si., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN RadenIntan Lampung.
4. Bapak Hervin Yongky Pradikta, M.H.I. selaku Sekertaris Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN RadenIntan Lampung.
5. Ibu Dra. Firdaweri, M.H.I.,selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk peyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M.,selakuPembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Siyasah Hukum Tata Negara, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.

8. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
9. Ayah dan Ibu yang selalu mendukung setiap langkahku serta doa yang tak pernah henti di haturkan oleh mereka disetiap sujudnya dan Adiku tercinta Habika Ma'ruf yang selalu member semangat untuk agar kelak dapat menjadi contoh untuk adikku yang selalu menjadi penyemangat dalam proses ini.
10. Saudara-saudaraku, Titah Uciyang sudah membantu meminjamkan laptop dalam proses skripsi ini, Paksu yang dimana telah memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, Uan piktor yang telah menyemangati, dan buat Tetanggaku Umi Inar yang juga telah meminjamkan Laptopnya dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Kawan-kawanku kak Riga, A. Fikri Thia Naufal, Ani Setiawati, Yusri Romadhon, Shinta Nur Asiah, Nezzi Amerta, Ismel, Rofiqul Umam, Anggi Yulanda Agustria, Andi Fernando, Andri Ratama, Yusril Iza Mahendra, Desi Yulianti, Desi Audina dan teman-teman kelas H yang dimana telah menemani, mengajari, menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Demikian penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya Amin

Bandar Lampung, 20 Mei 2020

Penulis

Nama:Reza Al-Tedi
NPM:1621020357

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikansi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian	9

BAB II BEBERAPA ASPEK FIQH SIYASAH TENTANG PENIPUAN, PENGHELAPAN, DAN PENCUCIAN UANG

A. Konsep Fiqh Siyasah	13
1. Pengertian Fiqh Siyasah	13
2. Bidang-bidang Fiqh Siyasah.....	14
B. Aspek Tentang Penipuan.....	17
1. Pengertian Penipuan	17
2. Jenis-jenis Penipuan	20
C. Penghelapan	28
1. Pengertian Penghelapan.....	28
2. Unsur-unsur Penghelapan.....	35
D. Tindak Pidana Pencucian Uang	36
1. Pengertian Pencucian Uang.....	36
2. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang.....	49
3. Tahap-tahap Tindak Pidana Pencucian Uang.....	53
E. Tinjauan Pustaka	55

BAB III YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG

A. Yurisprudensi	63
1. Pengertian Yurisprudensi	63
2. Fungsi Yurisprudensi	65
3. Dasar Hukum Yurisprudensi	66
4. Unsur-unsur Yurisprudensi	66
5. Manfaat Yurisprudensi	66
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung No 3096 K/Pid.Sus/2018 Perkara <i>First Travel</i>	67
B. Pertimbangan Hakim dalam Mejatuhkan Putusan	73
1. Pertimbangan Yuridis	73
2. Pertimbangan Sosiologis	73

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung tentang Yurisprudensi perkara <i>First Travel</i> No. 3096K/Pid.sus/2018	74
B. Analisis Fiqh Siyasah tentang pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung terkait perkara <i>First Travel</i>	75

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- A. Blangko Konsultasi Skripsi
- B. Hasil Turnitin



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu penulis akan berikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini.

skripsi ini berjudul **“ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENGENAI FIRST TRAVEL (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung No 3096 K/Pid.Sus/2018)**

maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Analisis Fiqh Siyasah

- a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, kupasan mengenai suatu soal¹
- b. Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurus kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri²

¹ J.C.T. Simorangkir, Rudi Erwin, J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2000) h.8

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontek Stualisasi Doktri Politik Islam* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014) h.4

Jadi yang dimaksud Analisis Fiqh Siyasah adalah suatu penelaahan atau pemahaman yang membicarakan pengaturan dan pengurus kehidupan manusia dalam bernegara dalam mencapai kemaslahatan manusia.

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung

a. Yurisprudensi dalam bahasa latin disebut dengan *Juriprudentia* yang berarti keputusan hakim, berisi suatu peraturan yang dibuat sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara yang diberikan wewenang kepadanya.³

b. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, susunan Mahkamah Agung adalah terdiri atas pimpinan, hakim anggota, dan seorang sekretaris.⁴

Jadi yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh mahkamah agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan mahkamah agung sendiri yang tetap⁵

3. *First Travel* adalah biro perjalanan wisata⁶. Dalam hal ini yang dibahas lebih dalam adalah mengenai penipuan biro perjalanan umrah.

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung No 3096 K/Pid.sus/2018 adalah putusan hakim mengenai perkara *Frist Travel* yang melakukan tindak pencucian uang dan penipuan

³ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* Cet I (Bandung: Pustaka Setia, 1998),h.120

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Penelitian Hukum (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional,1992) h.12

⁶ Studi Kasus First Travel” (On-line) tersedia di: <http://indahrofifah24.blogspot.com> (17 Januari 2020)

Berdasarkan penjelasan istilah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul secara keseluruhan adalah suatu upaya mengkaji secara ilmiah dengan cara menelaah putusan Mahkamah Agung dari perspektif Fiqh Siyasah mengenai perkara *Frist Travel*.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang menarik penulis dalam memilih judul ini antara lain :

1. Alasan obyektif

- a. Dalam kasus tindak pencucian uang, penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh *First Travel*, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman dengan di alihkannya aset *First Travel* untuk negara dan tidak ada ganti rugi kepada korban
- b. Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian. Untuk mengkaji lebih dalam dan menganalisis terkait yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kasus *First Travel*.

2. Alasan subyektif

- a. Banyak buku-buku referensi yang membahas tentang yurisprudensi Mahkamah Agung terkait pencucian uang.
- b. Pokok bahasan ini sesuai dengan jurusan yang penulis tekuni yaitu Siyasah syar'iyah.
- c. Pembahasan ini belum pernah dibahas sebelumnya di Fakultas Syari'ah dan Jurusan Siyasah Syar'iyah.

C. Latar Belakang

Perusahaan *Frist Travel* merupakan biro penyelenggara wisata, di bawah bendera CV *First Travel* Utama yang didirikan pada 1 juli 2009 dan berkedudukan di kota Depok tepatnya di Jalan Radar AURI, Cimanggis, Depok serta beralamat di Green Tower, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Perusahaan *First Travel* terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sejak mengantongi Keputusan Dirjen PHU Nomor: D/746 Tahun 2013. Kemudian izin dari Perusahaan *First Travel* diperpanjang dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 723 Tahun 2016. Perusahaan *First Travel* bergerak dalam penyelenggaraan ibadah umrah swasta yang berjenis Ongkos Naik Haji Plus, yang dimaksud di sini yaitu berupa plus pelayanan dalam hal perlengkapan penginapan, Transportasi dan konsumsi.

Namun seiringnya berjalan waktu para jamaah *Fist Travel* ketika hendak diberangkatkan umrah selalu ditunda-tunda hingga tahun berikutnya dan ada penambahan uang lain dari luar ketentuan yang tidak masuk dalam perjanjian awal kontrak yang seharusnya sudah lunas. Para jamaah yang merasakan kejangkalan yang dilakukan oleh pihak *First Travel* melakukan gugatan ke pengadilan negeri. Dalam proses di pengadilan negeri pihak *First Travel* terbukti melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun⁷, dan juga dalam agama Islam dilarang melakukan penipuan terhadap orang lain yang tercantum pada surat Al-Imran ayat 54:

وَمَكْرُوءٌ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ (ال عمران : ٥٤)

“Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. dan Allah Sebaik-baik pembalas tipu daya”(Q.S.Al-Imran(3):54)⁸

Selain dari itu, pemilik perusahaan ini juga diancam dengan tindak pidana Penggelapan dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah⁹ dan tindak pidana pencucian uang dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 pasal 3 tentang TPPU yang berbunyi “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau meyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian

⁷ Hamzah Andi, *KUHP Dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.144

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tejemahnya* (Jakarta Selatan: PT Panjita Cermelang, 2013), h. 57

⁹ Ibid., h 146

uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000.(sepuluh miliar rupiah) ¹⁰ yang dilakukan oleh Andika Surachman dan Aniesa Desvita Sari Hasibuan selaku pendiri *First Travel*.

Hasil kejahatan tersebut selanjutnya disembunyikan, disamarkan atau dikaburkan asal-usulnya, sehingga kemudian dapat digunakan seolah-olah sebagai uang dari hasil kegiatan usaha yang sah tanpa terdeteksi bahwa kekayaan tersebut berasal dari kegiatan ilegal.¹¹ Namun di dalam putusan tersebut aset dari *First Travel tersebut* dialihkan ke Negara dan tidak ada uang ganti rugi untuk para jamaah umrah, Putusan Mahkamah Agung tersebut sudah Inkracht tak bisa diganggu gugat lagi. Banyak para korban jamaah *First Travel* yang merasa putusan dari Mahkamah Agung tersebut tidak lah adil, karena seharusnya aset dari *First Travel* dikembalikan ke para jamaah *First Travel*. Jika banyaknya korban jamaah *First Travel* mengeluh karna merasa tidak adil, maka keputusan tersebut tidaklah sesuai. Dalam penegakan hukum mempunyai tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat¹². Pada hakikatnya penegakan hukum harus mewujudkan nilai-nilai yang memuat keadilan dan kebenaran. Juga dalam agama Islam penegakan hukum harus lah adil seperti surat An-Nissa ayat 58:

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹¹ Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia Perjalanan 5 Tahun*, (Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta, 2007), h.10

¹²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta :Liberty Yogyakarta, 1999), h.145

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء : ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”(Q.S.An-Nissa(4):58).¹³

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENGENAI *FIRST TRAVEL* (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung No 3096 K/Pid.Sus/2018).

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dititik beratkan pada pertimbangan hakim dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No 3096 K/Pid.Sus/2018 pada kasus *Fisrt Travel* dilihat dari perspektif Fiqh Siyasah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan di atas, pokok-pokok masalah yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung tentang yurisprudensi perkara *First travel*?
2. Bagaimana analisis Fiqh Siyasah tentang pertimbangan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung terkait *First Travel*?

F. Tujuan Penelitian

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tejemahnya* (Jakarta Selatan: PT Panjta Cermelang,2013) h.87

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung tentang putusan terkait *First Travel*
2. Untuk mengetahui Pandangan Fiqih Siyasah Tentang pertimbangan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung terkait *First Travel*

G. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi/manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Secara teoritis,
 - a. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai *First Travel*.
 - b. Dapat membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan tentang yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai *First Travel*.
 - c. Dapat menjadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian secara lebih lanjut serta lebih mendalam tentang yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai *First Travel*. .
2. Secara praktis
 - a. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai bidang studi yang merupakan tentang mata kuliah pokok dan diperdalam lebih lanjut lagi melalui studi-studi yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut.
 - b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu Hukum ketatanegaraan di setiap Perguruan Tinggi Fakultas Hukum.

- c. Memberikan sumbangan khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang pandangan Fiqh Siyasah mengenai yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai *First Travel*.
- d. Memberikan informasi dan masukan bagi para peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang ini.

H. Metode Penelitian

1. Jenis data dan sumber data

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literature dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang teliti¹⁴.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode *deskriptif-analitis*, artinya dengan mendeskripsikan yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai *First Travel*. secara komperhensif untuk kemudian dianalisa secara logis¹⁵, sehingga mendapat suatu kesimpulan.

¹⁴ Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 38.

¹⁵ Mardalis, *metode penelitian suatu pendekatan proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 26.

2. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan Hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu :

a. Sumber bahan Hukum primer

Yaitu Sumber yang diperoleh penelitian ini secara langsung yang berasal dari Al-Quran, Hadist, buku dan pendapat para ahli, beserta yang berhubungan dengan kajian tentang yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai *First Travel* dalam perspektif Fiqh Siyasah.

b. Sumber bahan Hukum sekunder

Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku. Bahan bahan sekunder diperoleh oleh referensi, buku-buku, koran, media “online”, jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian¹⁶ dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarsasi, menganalisis dan mempelajari data-data yan berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut. Dalam hal ini data

¹⁶Suharsin arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek (Ed.)* cet.4 (Jakarta: rineka cipta, 1998), h.236

yang dikumpulkan adalah teori yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, Fiqh yang berdarkan dengan judul skripsi ini ditambah dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 3096 k/Pid.Sus/2018

4. Metode Pengelolaan Data

Setelah sumber (literature) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut di kumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, atau buku-buku *literature* lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁷

5. Metode Analisis Masalah

Adapun metode analisis masalah yang digunakan adalah metode analisis isi (*Content Analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Karena dengan menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*) penulis dapat menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Dengan pendekatan yang berfikir secara *Deduktif* yaitu berpangkalan kaidah-kaidah bersifat umum

¹⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015),h .107.

yang kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus.



Logo of Universitas Islam Indonesia (UII) is a stylized green lotus flower with a white quill pen in the center, and a blue and purple open book at the base.

BAB II

BEBERAPA ASPEK FIQH SIYASAH TENTANG PENIPUAN, PENGGELAPAN, DAN PENCUCIAN UANG

A. Konsep Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah berasal dari dua suku kata ”*Fiqh*” dan ”*siyasah*”. Kata Fiqh Siyasah berasal dari *Faqaha-yafaqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian Fiqh adalah ”paham yang mendalam”. Secara istilah fiqh diartikan dengan upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*Mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam¹⁸. Sedangkan Siyasah berasal dari kata *Sasa-yasusu-siyasah* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf dalam buku Fiqh Siyasah karangan Dr.Muhammad Iqbal,M.Ag menjelaskan bahwa Siyasah adalah ”pengatur perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan¹⁹”.

Jadi berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam Fiqh Siyasah ini, ulama *mujtahid* menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di

¹⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014),h.3.

¹⁹*Ibid*,h.4

dalamnya hubungan antara bernegara dan bermasyarakat. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Fiqh Siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya²⁰.

2. Bidang-Bidang Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dari para ulama dalam menetapkan ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah. Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sultahanniyah* ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah terbagi menjadi enam bidang, menurut Abdul al-wahab Khallaf terbagi atas tiga bidang, sedangkan menurut T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, salah satu ulama terkemuka di Negara Indonesia, terbagi atas delapan bidang.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian Fiqh Siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:²¹ Pertama, Politik perundang-undangan (*Siyasah Dustruriyyah*), yang meliputi kajian tentang penetapan hukum (*Tasyri' iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadha' iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharajiyyah*). Bagian ini mencakup tentang hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga yang non-muslin yang berbeda kebangsaan (*Al-Siyasah Al-duali Al-khashsh*) atau yang disebut juga hukum

²⁰Munawir Sjazali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press,1991),h.2-3

²¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group,2014),h.16

perdata internasional dan hubungan diplomatik antara Negara muslim dan non-muslim, (*Al-Siyasah Al-duali Al-Amm*) atau yang disebut juga hubungan internasional yang mencakup tentang jual-beli, perjanjian, perikatan, dan hutang piutang yang dilakukan warga negara muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur anatara lain politik kebijakan Negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*Siyasah Harbiyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata. Ketiga, Politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik pajak, dan perbankan.

Pembahasan Fiqh siyasah juga dikenal istilah *Siyasah Syar'iyah* yang mana diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurus masalah kenegaraan yang berdasar kepada syariat. Abdurahman Taj yang merumuskan *Siyasah Syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisaikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan walaupun pengaturannya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan al-sunnah. Maka hakikat *Siyasah Syar'iyah* yakni:²²

²²*Ibid*,h.6

- a. Bahwa *Siyasah Syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*Ulu al-amr*)
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*Jalb al-mashalih wa daf al-mafaid*)
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.

Untuk mengukur bahwa suatu kebijakan politik yang dikeluarkan sesuai dengan syariat, maka pembuatan peraturan perundang-perundangan tersebut harus dilakukan musyawarah, sebagaimana atas perintah Allah SWT dalam Surah Al-Imran:159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
(العمران : ١٥٩)

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkallah kepada-Nya”.(Q.S.Al-Imran(3):(159).²³

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tejemahnya* (Jakarta Selatan: PT Panjta Cermelang,2013) h.71

Pada substansinya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁴

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dari Syariat Islam
- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintah (*al-musawah*)
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakan (*adam al-haraj*)
- d. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid*)

B. Aspek Tentang Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta. Tindak penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.

Menurut M. Sudrajat Bassar, “Penipuan adalah suatu bentuk berkicau. Sifat umum dari berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya”.²⁵

Tindak pidana penipuan dimuat dalam Bab XXV buku II KUHP dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Titel asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan atau ada juga menerjemahkan sebagai perbuatan curang.²⁶

²⁴*Ibid*,h.7

²⁵ M Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Penipuan Tertentu Dalam Kuhp* (Bandung:Remaja Karya,2008), h.81

²⁶Adani Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia Publisng,2003), h.115

Dalam tindak pidana penipuan, kesalahan tidak hanya terdapat pada si penipu saja, melainkan pada pihak pemilik harta juga bersalah, karena kebodohnya sehingga ia tertipu.²⁷

Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dan dinamakan *bedrog*, yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau matabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.²⁸

Dalam Pasal 378 penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditunjukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberikan hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat dan memakai serangkaian kebohongan, selanjutnya adalah unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.²⁹

Penjelasanya yaitu:

- a. Dengan maksud harus menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

²⁷Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h.120

²⁸Hamzah Andi, *KUHP Dan KUHP* (jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.144

²⁹Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP* (Jakarta: Gunung Mulia, 1983), h.631

Dapat diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapat keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan cara melawan hukum. Pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu.

Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan antara alat penggerak dan penyerahan barang.

c. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

Memakai nama palsu atau martabat palsu, maksudnya nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal orang lain.³⁰

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak

³⁰Yahman, *Karakteristik Wanprestasi DanTindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 113

diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataanya.³¹ Dalam pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh³²

Penipuan memiliki pengertian yang bertindak menyalahi aturan serta ketidak jujuran untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebanyak-banyak mungkin. Sudah jelas bahwa para pelaku kejahatan penipuan ini hanya memikirkan kepentingan pribadinya. Mereka tidak peduli terhadap nasib korbannya, hanya mementingkan tujuan dan misi mereka untuk tercapai. Kejahatan jenis ini sering terjadi karena masyarakat kerap kurang waspada sehingga sulit bagi aparat untuk memburu para pelaku. Maraknya kejahatan penipuan ini juga terjadi karena masyarakat tidak tahu tindakan yang harus diambil atau kurang ilmu pengetahuan yang dimiliki.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana penipuan

Jenis-jenis tindak penipuan ini sudah dijelaskan dan dipaparkan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Penipuan Ringan

Tindak pidana penipuan ini diatur dan diterangkan dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

³¹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), h.34

³²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h.62

matabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karna penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.³³

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan ringan sebagai berikut:³⁴

- 1) Unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok
- 2) Barang yang diserahkan sebagai objek tindak pidana penipuan haruslah bukan ternak dan nilainya tidak lebih dua puluh lima rupiah
- 3) Utang yang diberikan ataupun piutang yang dihapuskan tersebut tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

b. Tindak Penipuan Sebagai Mata Pencaharian

Tindak penipuan ini terkait dengan jual beli barang dapat kita lihat dalam Pasal 379 huruf a KUHP. Penipuan dalam Pasal 379 huruf a KUHP ini kenal dengan istilah ”Penarikan botol” atau penipuan sebagai mata pencaharian. Pasal 379 huruf a KUHP berbunyi:

“Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.³⁵

Adapun unsur yang terdapat dalam Pasal 379 huruf a KUHP, yaitu unsur objektif membeli barang menjadikan mata pencaharian, kebiasaan.

³³Hamzah Andi, *KUHP Dan KUHP* (jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.144

³⁴Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), h.148

³⁵Hamzah Andi, *KUHP Dan KUHP* (jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.146

Unsur subjektif yaitu dengan maksud mendapat barang untuk dirinya sendiri atau orang lain, dengan tidak membayar lunas. Yang diancam dalam pasal ini adalah seseorang yang menjadi kebiasaan atau mata pencaharian membeli barang tidak membayar lunas untuk dirinya atau untuk orang lain.

Unsur-unsur terpenting yang perlu diketahui dalam pasal ini adalah:

1) Perbuatan itu harus dilakukan sebagai pencaharian atau kebiasaan.

Apabila perbuatan itu hanya dilakukan satu kali saja, belum dapat dilakukan sebagai pencaharian atau kebiasaan. Pembelian barang seperti harus dilakukan berulang-ulang pada beberapa toko.

2) Pada waktu melakukan pembelian, harus sudah ada maksud akan tidak membayar lunas.³⁶

c. Tindak Pidana Penipuan Di bidang Hak Cipta

Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama, dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu

d. Tindak Pidana Penipuan Di bidang Asuransi

Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada peransuransian yang di mana unsur bermaksud tipu muslihat, berkata-kata bohong yang berkaitan dengan peransuransian

e. Tindak Pidana Penipuan Persaingan Curang

³⁶Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), h.147

Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*

f. Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli

Pasal 383 KUHP yang mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli.

Sedangkan dalam Pandangan Islam yang ditinjau dari syariat Islam tentang menipu adalah membohongi. Berlaku dusta merupakan ciri-ciri orang munafik. Munafik seperti dinyatakan dalam Al-Qur'an An-Nisaa ayat 145 sebagai berikut:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (النساء : ١٤٥)

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.”(Q.S. An-Nisaa(4):(145)³⁷

Ayat tersebut memberikan penilaian kepada orang munafik lebih membahaya dari pada orang kafir.³⁸ Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW telah mengharamkan dengan tegas semua bentuk penipuan dan kecurangan dalam hal apapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Hukum Islam ditegakan untuk melindungi lima hal, yaitu untuk perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Jika ditinjau dari tujuan hukum, akibat dari penipuan pihak korban mengalami kerugian. Karna si pelaku penipuan

³⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tejemahnya* (Jakarta Selatan: PT Panjita Cermelang,2013), h.160

³⁸Zainuddin Ali,*Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia)*,(Jakarta: Sinar Grafika,2008) h.120

menginginkan harta korban.³⁹ Agama Islam melindungi harta karna harta merupakan bahan pokok untuk hidup. Islam melindungi hak milik induvidu manusia sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang dengan dalih apapun. Islam telah mengharamkan mencuri, mengghasab, mencopet, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, nyuap dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan dalih kejahatan sebagai perbuatan yang batal.

Memakan hak milik orang lain berarti memakan barang haram.⁴⁰ Hukum pidana Islam menggolongkannya ke dalam hukum pidana pencurian (*sariqah*) dan (*hirabah*)

a. *Jarimah* Pencurian (*Sariqah*)

Secara etimologi *sariqah* adalah bentuk masdar atau verbal noun dari kata *saroqo* yang berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.⁴¹ Sedangkan dalam terminologis, *sariqah* dalam syariat Islam adalah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpananya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.⁴²

Dari beberapa definisi *sariqah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *sariqah* ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-

³⁹ *Ibid* h.120.

⁴⁰ Mustofa Hasan Dan Beni Ahmad saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV.Pustaka Setia,2003) h.329.

⁴¹ M.Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h.99

⁴² M.Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah,2011),h. 117

sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.⁴³

Pencurian dalam Syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) Pencurian yang hukumannya *had*, terbagi dua bagian:

a) Pencurian ringan adalah mengambil harta orang lain dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.

b) Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan

2) Pencurian yang hukumnya *ta'zir*. Pencurian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) Semua jenis pencurian dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi atau ada syubhat. Contohnya pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.

b) Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Misalnya mengambil jam tangan yang berada di tangan pemiliknya dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan.⁴⁴

⁴³M.Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h.101

⁴⁴H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Yogyakarta, Pesantren Nawesea Press, 2010), h.72

Adapun sanksi yang dapat diberikan bagi pelaku tindak pidana pencurian yang telah terbukti, maka pencuri dapat dikenakan dua macam sanksi yang diantaranya:⁴⁵

1). Penggantian kerugian (*dhaman*)

Dalam hukum pidana Islam ada perbedaan pendapat mengenai penjatuhan hukum bagi pelaku pencurian di antaranya: Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dijatuhkan hukuman ganti rugi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong dan ganti rugi dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasannya karna dalam pencurian terdapat dua hak yang dilanggar, yaitu hak Allah Swt dan hak manusia. Dengan ini, hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbalan dari hak Allah, sedangkan ganti rugi dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.

2). Hukuman potong tangan (*Had*)

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Oleh karna itu, hukuman potong tangan tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun oleh *ulil amri* (penguasa).

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.89

b. Jarimah Perampok (*Hirabah*)

Hirabah dalam bentuk mashdar dari kata *haroba* yang secara etimologis berarti *qotalahu* memerangi atau dalam kalimat *haroballoh* yang berarti seseorang bermaksiat kepada Allah.⁴⁶

Menurut Sayyid Sabiq, *hirabah* atau perampokan adalah sekelompok orang dengan satu keyakinan, perangai dan peraturan, yang memiliki tujuan untuk menciptakan kekacauan, petumpahan darah, perampokan, pelucutan kehormatan, perusakan tanaman dan pertumbuhan hewan ternak di Negara Islam.⁴⁷

Dasar hukum *jarimah hirabah* adalah firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 33 sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة : ٣٣)

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rosulnya, membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang dari negeri (kediamannya). Yang demikian itu sebagai balasan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.” (Q.S.Al-Ma'idah(5):(33)).⁴⁸

Menurut Abdul Qadir Audah *hirabah* adalah perampokan atau pencurian besar, cakupan pencurian yang meliputi perampokan itu ditinjau dari segi arti majas bukan arti hakikat, sebab pencurian itu mengambil harta secara sembunyi-sembunyi sedangkan pada perampokan pengambilan harta

⁴⁶M.Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h.122

⁴⁷SayyidSabiq, *FiqhSunnah4*(Jawa Barat: Keira,2015), h.146

⁴⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tejemahnya* (Jakarta Selatan: PT Panjta Cermelang,2013), h.113

dilakukan dengan cara terang-terangan. Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala Negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Oleh karena itu, cakupan makna *sariqah* tidak meliputi perampokan kecuali dengan penjelasan-penjelasan lain, sehingga perampokan disebut dengan pencurian besar, sebab kalau hanya diberi istilah pencurian maka perampokan tidak masuk kata tersebut. Keharusan diberikannya penjelasan termasuk tanda-tanda bahwa kata tersebut dalam kategori majas.⁴⁹ Jarimah *hirabah* sekalipun dinamakan pencurian besar tetapi tidak sama persis dengan pencurian.

C. PENGGELOPAN

1. Pengertian penggelapan

Tindak kejahatan yang marak terjadi yakni tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 377 KUHP. Tindak pidana sebagaimana tersebut “penyalahgunaan kepercayaan”. sebab inti dari tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”.⁵⁰

Penggelapan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan sebagai perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan

⁴⁹M.Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h.137

⁵⁰Ahmad Abu Abdul Halim, *Suap, Dampak Dan Bahayanya* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), h.52

mengikari janji tanpa perilaku yang baik. Menurut R. Soesilo, “penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362, bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.”⁵¹

Menurut Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah penggelapan diartikan sebagai penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan.⁵²

Van Haeringen, seperti yang di kutip Lamintang dan Djisman Samosi memberikan arti pada istilah “*verduistring*” atau “penggelapan” itu sebagai “*geheel donker maken*” ataupun sebagai “*uistralinc van lichtbeletten*” yang diartikan membuat segalanya menjadi gelap atau menghalangi memancarnya sinar.⁵³

Penggelapan dalam Pasal 372 KUHP adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.⁵⁴

⁵¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1991), h.249

⁵²Lamintang Dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus* (Bandung: Tarsito, 1979), h.174

⁵³*Ibid*, h. 175

⁵⁴Hamzah Andi, *KUHP Dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.146

Terdapat jenis –jenis penggelapan dalam buku II KUHP mengatur tentang kejahatan, di antaranya adalah penggelapan. Yang di mana penggelapan terdiri dari 6 pasal (372-377) yaitu:⁵⁵

a. Penggelapan dalam bentuk pokok.

Pasal 372 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, diancam penggelapan, dengan hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

b. Penggelapan ringan.

Pasal 373 yang berbunyi “Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

c. Penggelapan yang diperberat.

Pasal 374 dan Pasal 375 yaitu pada Pasal 374 yang berbunyi “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap benda, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena suatu pencaharian atau kerena mendapat upah untuk itu, diancam pidana paling lama lima tahun”.

⁵⁵*Ibid*, h.132

Dan Pasal 375 yang berbunyi “Penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah dititipkan kepada mereka atau oleh wali, curatur. Kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksanaan dari suatu wasiat, pengurus dari badan-badan amal atau yayasan-yayasan atas benda yang karena kedudukan mereka telah menguasai benda tersebut, dihukum dengan pidana selama enam tahun”.

d. Penggelapan dalam kalangan keluarga.

Pasal 376 yang berbunyi “Ketentuan yang di atur dalam Pasal 367 KUHP itu, berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab ini”.

e. Penggelapan 377.

1). Pada waktu pembedaan karena salah satu kejahatan yang di rumuskan dalam Pasal 372, 374 dan 375 diatas, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 35 KUHP No 1-4 yaitu: a). Hak memegang jabatan pada umumnya atas jabatan yang tertentu b). Hak memasuki angkatan bersenjata c). Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum d). Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri.

2). Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan mata pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk pencarian itu.

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam masalah penggelapan yang dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan memang tidak disebutkan secara jelas dan khusus dalam Al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi bukan berarti dalam Islam tidak membahas mengenai masalah ini. Justru diperlukan kajian Al-Qur'an untuk menemukan hukum dari masalah ini.

Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, apapun bentuk sistem tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pada ada dasar hukumnya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan *jarimah*.

Dalam Islam tidak ada khusus tentang penggelapan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penggelapan maka disini terdapat persamaan antara tindak penggelapan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu *ghulul*.

Dalam Islam penggelapan dikategorikan sebagai *ghulul*, karena *ghulul* merupakan penghianatan atau penggelapan harta rampasan perang pada zaman Rasulullah.

Adapun kata *ghulul* secara etimologi berasal dari kata *gholul yagholul* yang masdar, *lugholuta* invinitive atau verbal noun nya ada beberapa pola yang semuanya diartikan oleh Ibnu Al-Manzur dengan arti sangat kehausan dan kepanasan.⁵⁶

Kata *gholul* dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 161:

⁵⁶M. Nirul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah* Cet ke-1 (Jakarta: Badan Litbang Dan Departemen Agama, 2009), h.94

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (العمران : ١٦١)

“Yang tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi”.(Q.S. Ali-Imran(3):161).⁵⁷

Pada umumnya para ulama menghubungkan ayat 161 surat Ali-Imran ini dengan peristiwa perang Uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H, walaupun ada juga riwayat yang menginformasikan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus sehelai beludru merah yang hilang pada waktu perang badar.⁵⁸

Ayat ini menegaskan bahwa tidak mungkin dalam satu waktu atau keadaan seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat nabi adalah amanah, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi nabi Muhammad SAW, penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan.⁵⁹

Kata *Al-Ghulul* (culas) berarti menyembunyikan sesuatu ke dalam barang-barangnya dengan cara mengkhianati, menipu, dan berlaku culas kepada kawan-kawan, terutama sekali menyembunyikan harta rampasan sebelum dibagi-bagi.

Menurut keterangan jumbuh, pengertian *ghulul* yaitu membawa barang apa yang telah diculaskanya, berarti di hari kiamat kelak, segala barang tipuan

⁵⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tejemahnya* (Jakarta Selatan: PT Panjta Cermelang,2013), h.71

⁵⁸M. Nirul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah* Cet ke-1 (Jakarta: Badan Litbang Dan Departemen Agama, 2009), h.95

⁵⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta:Lentera Hati,2002),h.320

yang dilakukannya terhadap kawan-kawannya akan dipikulnya sendiri di atas pundaknya, agar dia merasa malu dari perbuatan yang culas dan sebagai tambahan azab perbuatannya yang amat khianat itu.⁶⁰

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya istilah dari *ghulul* diambil dari ayat 161 Ali-Imran yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan terhadap harta *baitul mal*, harta milik bersama kaum muslimin, harta dalam suatu kerjasama, harta negara, harta zakat, dan harta lain-lainnya.

Dalam Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan melarang atau mengharamkan tindak pidana penggelapan. Walaupun Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan. Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, serta segala sesuatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Diantaranya ayat Al-Qur'an yang mencegah, melarang perbuatan-perbuatan tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : ١٨٨)

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”(Q.S Al-Baqarah(2):188)⁶¹

⁶⁰Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana,2006), h.187

⁶¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tejemahnya* (Jakarta Selatan: PT Panjita Cermelang,2013), h. 29

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya mengambil harta yang bukan haknya merupakan perbuatan yang tidak benar dan berdosa. Sama halnya dengan penggelapan oleh pihak *First Travel* yaitu memakan harta dengan jalan yang salah dengan tidak menuruti peraturan yang sesuai.

Penggelapan yang dilakukan oleh pihak *First Travel* tersebut dalam Islam dikenakan hukuman *ta'zir*, yang dimana besar kecilnya hukuman itu diserahkan kepada ulil amri (pemerintah) dan hakim. Adapun hukuman *ta'zir* yang berat dan tidaknya berdasarkan ijtihad yaitu berdasarkan peraturan yang ada.

Sedangkan menurut Ahmad Wardi Muslich, hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara, sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara. Tujuannya untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga melindungi kepentingan individu.⁶²

a. Hukuman *takzir*

Berdasarkan nas Al-Qur'an hukuman untuk seseorang yang memakan harta secara tidak sah dengan menentang atau melanggar hak merupakan hukuman *ukhrawi*. Hukuman *ukhrawi* berupa hukuman siksa neraka, yang disesuaikan dengan kejahatannya.

Jarimah takzir adalah perbuatan maksiat. Maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para *fuqha* memberikan contoh meninggalkan kewajiban yaitu mengkhianati amanah, seperti penggelapan titipan,

⁶²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.27

memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf, dan lain-lain. Sebagai contoh perbuatan yang dilarang, seperti sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, melakukan jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan.⁶³

b. Hukuman potong tangan

Menurut Hasbi Ash-Shidziqy, orang yang mengingkari telah meminjam sesuatu barang di potong tangannya.⁶⁴ Sedangkan menurut Ahmad dan Ishaq yang dikutip Haliman, terhadap delik penggelapan ini berlaku ketentuan hukum *had* potong tangan.⁶⁵ Tetapi Jumhur berpendapat, peminjam yang ingkar itu harus dipotong tangannya. Mereka berdalil dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang hanya mewajibkan potong tangan itu atas pencuri, sedangkan peminjam yang ingkar itu bukan pencuri. Pendapat ini dibantah, bahwa orang yang ingkar itu dapat digolongkan sebagai pencuri.⁶⁶

Zulfar serta ulama Khawarij, Ahlul Dhahir dan Ibnu Hazm seperti yang dikutip Hasby Ash-Shidziqy, menetapkan bahwa mereka yang mengingkari barang yang dipinjamnya dipotong tangan. Ibnu Qayyim, memasukan orang yang mengingkari pinjaman kedalam golongan pencuri.

⁶³*Ibid*, h.140

⁶⁴Hasby As-Shiddieqy, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum* (Semarang: Pustaka Rezeki, 1970), h. 167

⁶⁵Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h.440

⁶⁶Faishol, *Naitul Uthar VI* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), h. 63

Mereka yang menyerobot dan menggelapkan barang tidak dikategorikan sebagai pencuri.⁶⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Dalam tindak penggelapan terdapat unsur-unsur nya yaitu:⁶⁸

- a. Unsur Subjektif, unsur ini berupa kesengajaan pelaku, untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang melalui kata: "*dengan sengaja*"
- b. Unsur Objektif, yang terdiri atas:
 - 1) Unsur barang siapa
 - 2) Unsur menguasai secara melawan hukum
 - 3) Unsur suatu benda
 - 4) Unsur sebagian atau keseluruhnya milik orang lain
 - 5) Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Unsur barang siapa diatas menunjukan orang, apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan, maka ia disebut pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan.⁶⁹

Unsur menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki), maksud unsur ini adalah menguasai secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Suatu benda ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya

⁶⁷*Ibid*, h. 64

⁶⁸Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Bandung: Sinar Baru Offset, 1989), h.105

⁶⁹*Ibid*, h.107

sering disebut dengan benda bergerak. Seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain. Sebagaimana keterangan Simons, “Penggelapan atas benda yang sebagian merupakan kepunyaan orang lain itu dapat saja terjadi”.

D. PENCUCIAN UANG

1. Pengertian pencucian uang

Pencucian uang merupakan terjemahan dari bahasa inggris *Money Laundering*. Dalam dunia internasional pun belum ada definisi yang baku tentang *Money Laundering*. Berkaitan dengan definisi pencucian uang, beberapa ahli seperti Sultab Renny Sjahdeini memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang atau *Money Laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana maksud untuk menyembunyikan dari otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*Financial System*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal atau dikatakan sah.⁷⁰

Irman mengemukakan definisi dari pencucian uang *Money Laundering* sebagai perbuatan atau upaya dari pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul upaya harta kekayaan, yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara memasukkan harta kekayaan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, khususnya sistem perbankan baik di dalam maupun di luar

⁷⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Grafiti, 2007) h.5

negeri, dengan maksud untuk menghindari dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan dan mengamankan harta kekayaan hasil kejahatan dari sitaan aparat hukum.⁷¹

Menurut Hanafi Amrani beberapa definisi mengenai pencucian uang oleh beberapa ahli setidaknya kemudian memunculkan ruang lingkup pencucian uang yang dapat dibedakan menjadi tiga unsur yaitu: pertama, ada sejumlah uang yang berasal dari kegiatan ilegal tertentu. Kedua, agar uang itu tidak disita atau agar pelaku tidak dipidana, uang tersebut perlu diubah agar tampak seperti legal dengan menjadikan uang bersih. Ketiga, ini bisa dilakukan dengan menyelamatkannya melalui sejumlah langkah yang meliputi penempatan (*placement*), penyelubungan (*layering*), dan penggabungan atau pencampuran (*integration*). Secara sederhana, bahwa pencucian uang dapat diasumsikan sebagai pemindahan uang ilegal dengan tujuan menyelamatkan sumbernya dan menggabungkannya kembali ke dalam kegiatan ekonomi formal yang sah⁷².

Menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Tindak pencucian uang dapat disebut sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang

⁷¹Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Bandung: MQS Publishing, 2006) h.2

⁷²Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: UII Press, 2015) h.6

diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁷³

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, secara sederhana dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

“Pencucian uang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan organisasi dalam rangka menyembunyikan uang atau harta kekayaannya yang diperoleh dari hasil ilegal ke sistem hasil jerih parah yang halal, dengan maksud agar uang tersebut tampak legal”

Terdapat berbagai rumusan tindak pidana pencucian uang, serta juga dikatakan bahwa tidak ada definisi pencucian uang yang bersifat universal, sehingga setiap negara pada dasarnya boleh merumuskan definisi pencucian uang sendiri sesuai kondisi negaranya masing-masing⁷⁴.

Pada umumnya pelaku pencucian uang tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang, sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman⁷⁵.

Ini sangatlah bertentangan dengan peraturan yang ada dengan cara melawan hukum.

Objek pencucian uang tidak terbatas pada uang (*money*) saja, tetapi apapun juga yang termasuk, baik benda bergerak maupun tidak bergerak⁷⁶.

⁷³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Visimedia, 2012) h.4

⁷⁴ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan permasalahannya Di Indonesia*, Edisi Kesatu (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h.15

⁷⁵ Yusup Saprudin, *Money Laundering* (Jakarta: Pensil-324, 2006) h.17

⁷⁶ Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar Kuhp* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010) h.99

Dalam Pasal 1 UU No 8 Tahun 2010 yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan UU No 8 Tahun 2010 Pasal 3 yang berbunyi “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Pasal 4 yang berbunyi “setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 5 yang berbunyi a. Setiap yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara

dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6 yang berbunyi a. Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendalian Korporasi, b. Pidana di jatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: 1). Dilakukan atau diperintahkan oleh personil Pengadali Korporasi 2). Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi 3). Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah 4). Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7 yang berbunyi a. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), b. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: 1). Pengumuman putusan hakim 2). Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi 3). Pencabutan izin usaha 4). Pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi 5). Perampasan aset Korporasi untuk negara 6). Pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8 yang berbunyi “Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan

Pasal 5, pidana tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun 4 (empat) bulan”.

Pasal 9 yang berbunyi a. Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan, b. Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 10 yang berbunyi “Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Yang termasuk ke dalam unsur unsur tindak pidana pencucian uang adalah:

Pertama, Setiap orang baik perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi.

Kedua, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatanlain atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduganya meruapakan hasil

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU No 8 Tahun 2010.

Ketiga, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU No 8 Tahun 2010.

Keempat, bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU No 8 Tahun 2010.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya⁷⁷. Hal ini bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang berasal dari tindak pidana tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.⁷⁸

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur sistem pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana diatur

⁷⁷Yunus Husein, "PPATK: Tugas, Wewenang, Dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22 No. 3 (februari 2010), h. 26

⁷⁸*Ibid*, h. 27

Pasal 6 ayat 1, yang berbunyi “Dalam hal ini tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi.”⁷⁹

Dalam hal ini terdapat tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana yaitu:⁸⁰

- a. Korporasi yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana di mana korporasi sendiri yang memikul pertanggung jawaban
- b. Korporasi sebagai pelaku dan personil pengendali korporasi (pengurus korporasi) yang memikul pertanggung jawaban pidana
- c. Korporasi bersama personil pengendali korporasi sebagai pelaku dan keduanya memikul pertanggung jawaban pidana.

Ketika pengurus korporasi berperan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, maka beban pertanggung jawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasi saja, apabila:

- a. Perbuatanya dilakukan oleh pengurus korporasi biasa yang bukan merupakan personil pengendali korporasi.
- b. Perbuatan pengurus korporasi tersebut tidak menguntungkan korporasi tetapi hanya menguntungkan individu semata.
- c. Perbuatan pengurus korporasi itu dilakukan bertentangan dengan maksud dan tujuan korporasi.

⁷⁹Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁸⁰Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 2007), h. 72

- d. Perbuatan pengurus korporasi meyim pang dari fungsi dan tugasnya dalam suatu korporasi.

Hal tersebut disebabkan karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu yang salah, tetapi yang melakukan perbuatan itu dilandasi sikap kalbu tertentu, baik yang berupa kealpaan ataupun kesengajaan maka pengurus dari korporasi itulah yang harus memikul pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sendiri dan bukan untuk dan atas nama korporasi.

Pengurus korporasi dapat dikatakan yang sebagai mewakili korporasi, yang di mana sudah diatur dalam Undang-Undang ini, apabila:

- a. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi
- b. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi

Dari penjelasan di atas, maka sistem pertanggung jawaban pidana korporasi pada tindak pidana pencucian uang yang terbagi menjadi empat sistem pertanggung jawaban pidana yaitu:⁸¹

- a. Korporasi yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana maka korporasi sendiri yang harus memikul pertanggung jawaban pidana.
- b. Korporasi sebagai pelaku maka personil pengendali korporasi (pengurus korporasi) yang harus memikul pertanggung jawaban pidana

⁸¹Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: PT Grafiti Pres, 2007), h.59

- c. Korporasi bersama dengan personil pengendali korporasi sebagai pelaku dan keduanya harus memikul pertanggung jawaban pidana
- d. Pengurus korporasi berperan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang maka beban pertanggung jawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasi saja.

Apabila pengurus korporasi bertindak tidak untuk dan atas nama korporasi, maka pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada korporasi itu sendiri. Kemudian apabila pengurus korporasi (personil, pengendali korporasi) bertindak untuk dan atas nama korporasi (bersama-sama dengan korporasi), maka pertanggungjawabannya dapat dibebankan kepada korporasi dan pengurus korporasi itu sendiri.

Adapun untuk sanksi yang dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan pencucian uang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), dimana dalam Pasal tersebut menegaskan korporasi dapat dikenakan pidana denda dan bahkan dapat dikenakan pidana tambahan dari sekedar pengumuman keputusan hakim hingga pengambilalihan oleh negara. Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

“Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”⁸²

Sedangkan pidana tambahan yang dapat dikenakan pada korporasi dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:

“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. Pengumuman keputusan

⁸²Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang, Pasal 7 ayat (1)

hakim; b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; c. Pencabutan izin usaha; d. Korporasi untuk negara dan/atau f. Pengambilalihan aset oleh negara”.⁸³

Dalam hukum Islam, Perbuatan tindak pidana disebut sebagai *jarimah*, yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan *had* atau *ta’azir*. Sedangkan unsur-unsur dapat dikategorikan telah berbuat *jarimah* meliputi:⁸⁴

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai “unsur formil”
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatannya ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut “unsur material”
- c. Pembuat adalah orang *mukhallaf* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya. Dan unsur ini biasa disebut “unsur moril”. Dengan adanya unsur-unsur tersebut maka apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang tergolong *jarimah*, maka orang tersebut akan dapat dikenakan hukumannya.

Tindak pidana pencucian uang memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur’an, tetapi Allah Swt telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda seperti firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 29:

⁸³*Ibid*, Pasal 7 ayat(2).

⁸⁴A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 110-111

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu” (Q.S An-nisa(4):29).⁸⁵

Secara umum, ajaran agama Islam mengharamkan mencari rezeki dengan cara-cara yang batil dan penguasaan yang bukan hak miliki dia seperti pencurian, penipuan, perampokan, penyuapan yang menyebabkan kerugian bagi pihak orang lain.

Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum Islam. *Money Laundering* termasuk ke dalam *jarimahta'zir* karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, namun jelas sangat merugikan umat manusia dan beberapa efek negatif, yaitu:⁸⁶

- a. Membahayakan kehidupan manusia.
- b. Menghambat terwujudnya kemaslahatan.
- c. Merugikan kepentingan umum.
- d. Mengganggu ketertiban umum.
- e. Mengganggu kehidupan sekaligus harta orang lain.

Sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang adalah hukuman yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya

⁸⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tejemahnya* (Jakarta Selatan: PT Panjita Cermelang, 2013), h. 83

⁸⁶M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013) , h. 171

hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila masalah. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.

Ulama yang membolehkan adanya sanksi *ta'zir* berupa mengambil harta benda mengartikannya dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkannya. Alasannya adalah karena tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa ada alasan hukum yang membolehkannya.

Ada pula ulama yang berpendapat bahwa sanksi *ta'zir* berupa harta diperbolehkan pada waktu Islam lalu dinaskh, karena dengan diperbolehkannya sanksi yang demikian maka menyebabkan Ulil Amri mengambil harta orang lain dengan sewenang-wenang. Akan tetapi alasan ulama tidak memperbolehkannya ini tidak dapat diterima oleh jumhur ulama, karena banyak bukti, baik Rasulullah maupun Khalifah al-Rasyidin menerapkan sanksi *ta'zir* berupa harta ini, seperti keputusan Rasul yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat *khamar* dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang dicuri dari pohonnya serta memberikan hukuman didenda kepada pencuri harta dari tempat penyimpanan yang layak.⁸⁷ Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa *jarimah* yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhi

⁸⁷*Ibid*, h.172

hukuman selama 5 tahun dan jilid karena telah melakukan pengkhianatan terhadap amanah harta.⁸⁸

Hukum Islam sejak kelahirannya telah mengenal badan-badan hukum. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa para fuqaha mengenal *baitul mal* (perbendaharaan negara) sebagai badan hukum *hay'ah qanuniyyah*, demikian juga dengan sekolah dan rumah sakit.

Institusi *baitul mal* didirikan pertama kali setelah turun firman Allah Swt surat Al-Anfal mengenai perselisihan para sahabat tentang pembagian *ghanimah* (rampasan perang) Badar. Surat Al-Anfal Ayat 75:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الأنفال : ٧٥)

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesama dan taatlah kepada Allah dan Rasul-nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman” (Q.S. Al-Anfal(8):75)⁸⁹

Hanya saja, pada zaman Nabi Muhammad Saw, *baitul mal* belum memiliki kantor khusus yang difungsikan untuk mengatur sistem pelaksanaan harta. Sebab pada saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak, dan biasanya langsung habis didistribusikan untuk kepentingan kaum umat Muslim.⁹⁰

⁸⁸ Abdurrahman Al-Maliki Dan Ahmad Ad-Daur, *Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), h.277

⁸⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tejemahnya* (Jakarta Selatan: PT Panjita Cermelang, 2013), h.177

⁹⁰ Syamsuddin Ramadhan, "Baitul Mal" (On-line), tersedia di :<https://syamsuddinramadhan.wordpress.com> (2 Maret 2020)

Pada zaman kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, beliaulah orang pertama yang membangun *baitul mal*. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Sahl bin Abi Khaitamah dan lainnya, bahwa di sebuah tempat yang tidak dijaga siapa pun dikatakan kepadanya: Apakah tidak kau ditempatkan seseorang untuk menjaganya? Dia berkata: “Bukankah ada gemboknya?” Dia itu membagikan apa yang ada di *baitul mal* hingga kosong. Tatkala dia pindah ke Madinah, dia memindahkan *baitul mal* ke rumahnya. Harta kaum muslimin disimpan di dalam *baitul mal* itu.⁹¹

Tetapi hukum Islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai objek pertanggung jawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan-badan hukum tersebut. Adapun bila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang mengelola lembaga tersebut, orang itulah yang hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.⁹²

Ijtima Ulama Indonesia menilai pencucian uang sejajar dengan pencurian dan penipuan. Kejahatan ini mendapat perhatian lebih, dikarenakan pidana ini belum pernah dibahas oleh ulama zaman dulu.

2. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak pada tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Al-Capone, Penjahat terbesar di

⁹¹Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h.87

⁹²Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: Kharisma Ilmu, 2010) h.68

Amerika Serikat pada masa lampau atau dulu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatan dengan menggunakan Meyer Lansky, orang polansia, yaitu seorang akuntan, mencuci uang kejahatan AL-Capone melalui usaha binatu (*laundring*)⁹³. Al-Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi, yaitu perusahaan pencucian pakaian ini sangat berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran⁹⁴.

Tindak pencucian uang bukan merupakan fenomena baru. Istilah pencucian uang digunakan untuk pertama kalinya dalam dokumen hukum primer pada tahun 1992 melalui kasus penyitaan perdata antara Amerika Serikat vs tindak pencucian uang. Kasus ini adalah tentang upaya menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan ilegal dan penyitaan perdata atas sejumlah besar uang dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami, Florida. Dalam putusnya, pengadilan menyimpulkan bahwa pengalihan dan Dar Molins ke bank di Sonal sangat mungkin merupakan proses pencucian uang. Pengadilan tersebut memang tidak mendefinisikan istilah itu, namun para pakar menyimpulkan bahwa fenomena ini mengacu kepada pencucian uang.⁹⁵

Istilah pencucian uang dibawa ke jenjang internasional melalui pemberlakuan konvensi PBB melawan pengedaran gelap narkoba dan

⁹³Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika,2010) h.17

⁹⁴*Ibid*, h.18

⁹⁵Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang Cet Pertama* (Yogyakarta :UII Pres,2015), h.3

psikotropika (selanjutnya disebut konvensi Wina PBB 1998).⁹⁶ Konvensi ini merekomendasi para pihak untuk mengkriminalisasi praktik pencucian uang dan pengedaran narkoba.

Namun sebetulnya praktik mencuci uang tersebut boleh dikatakan telah dilakukan jauh sebelum itu, misalnya yang dilakukan oleh para pelarian dari Perancis pada abad 17 untuk menyembunyikan atau melindungi dana pelarian (*capital flight*). Pada saat itu, Swiss membantu menyembunyikan harta kekayaan para bangsawan Protestan Perancis termasuk kaum pedagangnyanya dari pengejaran raja-raja Katholik Perancis untuk menyita harta mereka, yang dianggap tidak sah.

Bank-bank Swiss saat itu sangat banyak sekali menerima dana pelarian dari Perancis, baik itu dari yang mengaku sebagai bangsawan yang melarikan diri dari puri-puri mereka, ataupun berkedok sebagai pengungsi, yang ternyata juga banyak di antaranya hasil pencucian dari pedagang yang kaya raya. Swiss juga membawa harta kekayaannya yang berasal dari Adolf Hilter dan Nazi. Pihak Perancis menyatakan mereka membawa dana pelarian dan para bangsawan termasuk juga para pedagang yang kemudian menyembunyikannya di Swiss dengan dibantu pihak Swiss dan selanjutnya dapat digunakan secara aman.⁹⁷

Pada tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam dunia hukum di Indonesia, karena pada saat itu disahkannya Undang-Undang

⁹⁶*Ibid*, h.4

⁹⁷Yenti Ganarsih, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Teori Dan Praktik*(Jakarta: Sinar Grafika,2013), h. 3

Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ditentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang tersebut merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari *Financial Action Task Force* (FATF), badan internasional di luar dari PBB. Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional. Pada 23 Oktober 2003, FAFT, di Stockholm, Swedia. Menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang.

Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Filipina, dan Ukraina termasuk kategori yang sama. Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances* 1998 (konvensi 1998). Konsekuensi ratifikasi tersebut, Indonesia dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain karena menganut sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, maraknya kejahatan narkoba, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian

Indonesia dalam keadaan yang tidak begitu baik, sehingga ada kecenderungan akan menerima dana dari mana pun untuk keperluan pemulihan ekonomi.⁹⁸

Keadaan Indonesia berada pada daftar *Non Cooperative Countries And Territories* sesuai dengan rekomendasi (*NCCT's*) dari *Financial Actions Task Force On Money Laundering*. Bahwa setiap transaksi dengan perorangan maupun badan hukum yang berasal dari negara *NCCT's* harus dilakukan dengan penelitian seksama. Berbagai upaya selama beberapa tahun, antara lain dengan mengesahkan UU No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mendirikan PPATK, mengeluarkan ketentuan pelaksanaan dan mengadakan kerja sama internasional, akhirnya membuahkan hasil. Februari 2006 Indonesia dikeluarkan dari daftar *NCCT's* setelah dilakukan formal monitoring selama satu tahun.⁹⁹

Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 2010, DPR bersama Presiden menyetujui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan adanya Undang-Undang ini bertujuan untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang ada di Indonesia.

3. Tahap-Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang

⁹⁸Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Upaya Pencegahannya, *Jurnal Equality*, Vol. 11 No.1 (Februari 2006), h.2

⁹⁹*Ibid*, h. 3

Tindak pencucian uang biasanya dilakukan melalui tiga tahap yaitu penempatan (*placement*), transfer (*layering*), dan menggunakan harta kekayaan atau uang (*integration*).¹⁰⁰

a. Penempatan (*Placement*)

Yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat, deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan (penyedia jasa keuangan), terutama ke dalam sistem perbankan.¹⁰¹

Pada tahap penempatan bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktifitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya semua tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang¹⁰²

Menurut Adrian bentuk kegiatan dari *Placement* antara lain:¹⁰³

- 1) Menempatkan dana bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan

¹⁰⁰ Sultan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafika, 2004), h.35

¹⁰¹ *Ibid*, h.36

¹⁰² Tb Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, cet 1 (Bandung: MQS Publishing, 2004) h.41

¹⁰³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h.24

- 2) Menyetorkan uang pada penyedia jasa (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit *trail*
- 3) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah dari suatu negara ke negara lain
- 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan
- 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK

b. Transfer (*layering*)

Yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada jasa keuangan (termasuk bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa yang lain. Dengan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.¹⁰⁴

Bentuk kegiatan dari *layering* adalah:¹⁰⁵

- 1) Transfer dan dari suatu ke bank lain dan atau antar wilayah atau negara
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah
- 3) Memindahkna uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*

¹⁰⁴Sultan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafika,2004), h.35

¹⁰⁵Soewasono, Reda Mantovani, *Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang di Indonesia* (Jakarta: Malibu,2004), h.7

c. Menggunakan Harta Kekayaan/Uang (*integration*)

Tahap terakhir dari proses pencucian uang adalah *integration* (dari harta atau uang ilegal) yaitu suatu upaya untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis yang sah, atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.¹⁰⁶

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan peninjauan pustaka dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung Mengenai *Fisrt Travel* (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung No 3096 K/Pid.Sus/2018).

1. Penelitian yang dilakukan oleh Diaz Pratiwi Mukti Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berjudul “Analisis Petanggungjawaban PT *FisrtTravel* Anugerah Karya Wisata Kepada Jamaah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan 209/Pdt.G/2017/PN.DPK)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban PT *First Travel* Anugerah Karya Wisata kepada jamaah akibat perbuatan melawan hukum yang digugat oleh para jamaah dengan putusan 209/Pdt.G/2017/PN.DPK namun putusan tersebut tidak dijalankan oleh PT *First Travel* anugerah wisata.

¹⁰⁶ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.21

Jadi perbedaan penelitian yang diatas dengan Skripsi yang penulis tulis adalah tidak dilaksanakan nya putusan209/Pdt.G/2017/PN.DPK yang dimana seharusnya dilaksanakan, sedangkan penelitian yang penulis tinjau adalah Analisis Fiqh Siyasah yurisprudensi tentang perkara *First Travel* dan persamaanya sama-sama membahas perkara kasus *First Travel*.¹⁰⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Fariz Zakirfan Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berjudul “Peranan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Travel Umroh (Studi Kasus *First Travel*)”. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana peranan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh.

Jadi perbedaan penelitian yang diatas dengan skripsi yang penulis tulis adalah bagaimana peranan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh sedangkan penelitian yang penulis tinjau adalah bagaimana analisis Fiqh Siyasah tentang yurisprudensi tentang perkara *First Travel* dan persamaanya sama-sama membahas perkara kasus *First Travel*.¹⁰⁸

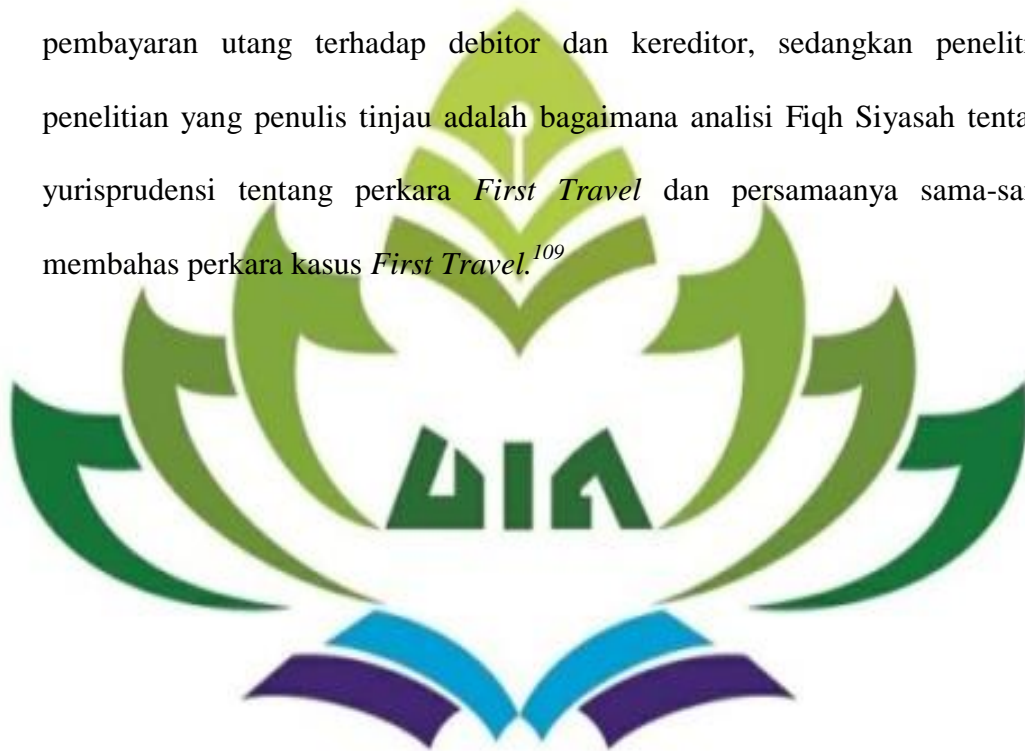
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rifki Rahmadani Jurusan Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul “Akibat Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kausu PT FirstAnugerah Karya wisata (*First Travel*)

¹⁰⁷Diaz Pratiwi Mukti, *Analisi Pertanggungjawaban Pt First Anugerah Karya Wisata Kepada Jamaah Akibat Melawan Hukum* (Skripsi Program Strata 1 Universitas Lampung, Lampung,2018)

¹⁰⁸Akhmad Fariz Zakirfan,*Peranan Penyidik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Travel Umroh* (Skripsi Program Strata 1 Universitas Lampung, Lampung,2018)

Ditinjau Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 105/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitor dan kreditor.

Jadi perdedaan penelitian diatas dengan skripsi penulis tulis adalah untuk mengetahui dan memahami akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitor dan kreditor, sedangkan penelitian penelitian yang penulis tinjau adalah bagaimana analisi Fiqh Siyasah tentang yurisprudensi tentang perkara *First Travel* dan persamaanya sama-sama membahas perkara kasus *First Travel*.¹⁰⁹



¹⁰⁹Rifki Rahmadani, *Akibat Hukum Bagi Kreditor Dalam Kasus Pt. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Ditinjau Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Skripsi Program Strata 1 Jember, Jawa Tengah, 2018)

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an:

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tejemahnya* Jakarta
Selatan: PT Panjta Cermelang, 2013

B. Buku:

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015

Abdurrahman Al-Maliki Dan Ahmad Ad-Daur, *Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam* Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004

Adani Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia Publising, 2003

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan* Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Ahmad Abu Abdul Halim, *Suap, Dampak Dan Bahayanya* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2004

As-Shiddieqy, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum* Semarang: Pustaka Rezeki, 1970

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* Jakarta: Visimedia, 2012

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Penelitian Hukum Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* Bandung: PT Rafika Aditama, 2011

Faishol, *Naitul Uthar VI* Surabaya: Bina Ilmu, 1986

H.A Djazuli, *Fiqh Jinanyah* Yogyakarta, Pesantren Nawesea Press, 2010

Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah* Jakarta: Bulan Bintang, 1970

Hamzah Andi, *KUHP Dan KUHP* Jakarta: Rineka Cipta, 2011

- Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang Cet Pertama* Yogyakarta :UII Pres, 2015
- Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008
- Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bandung: MQS Publishing, 2006
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* Jakarta: Kencana, 2014
- J.C.T. Simorangkir, Rudi Erwin, J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Lamintang Dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus* Bandung: Tarsito, 1979
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* Bandung: Sinar Baru Offset, 1989
- M Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Penipuan Tertentu Dalam Kuhp* Bandung: Remaja Karya, 2008
- M. Nirul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah* Cet ke-1 Jakarta: Badan Litbang Dan Departemen Agama, 2009
- M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* Jakarta: Amzah, 2013
- M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* Jakarta: Amzah, 2011
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Mardalis, *metode penelitian suatu pendekatan proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 2007
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontek Stualisasi Doktri Politik Islam* Jakarta : Prenadamedia Group, 2014
- Munawir Sjazali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* Jakarta: UI Press, 1991
- Mustofa Hasan Dan Beni Ahmad saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum Cet I* Bandung: Pustaka Setia, 1998

- Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia Perjalanan 5 Tahun*, Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta, 2007
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Bogor: Politeia, 1991
- Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis* Bandung: Taruna Grafika, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 4 Jawa Barat: Keira, 2015
- Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP* Jakarta: Gunung Mulia, 1983
- Soewasono, Reda Mantovani, *Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang di Indonesia* Jakarta: Malibu, 2004
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* Yogyakarta :Liberty Yogyakarta, 1999
- Suharsi narikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek (Ed.)* cet.4 Jakarta: rineka cipta, 1998
- Sultan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme* Jakarta: PT Pustaka Utama Grafika, 2004
- Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi* Jakarta: PT Grafiti Pres, 2007
- Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* Jakarta: Kencana, 2006
- Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* Bogor: Kharisma Ilmu, 2010
- Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar Kuhp* Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan* Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Yenti Ganarsih, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Teori Dan Praktik* Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan permasalahannya Di Indonesia*, Edisi Kesatu Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2008

C. Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

D. Jurnal:

Yunus Husein, “PPATK: Tugas, Wewenang, Dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22 No. 3 (februari 2010)

Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Upaya Pencegahannya, *Jurnal Equality*, Vol. 11 No.1 (Februari 2006),

E. Online Information Via Internet

Studi Kasus First Travel” (On-line) tersedia di: <http://indahro.fifah24.blogsopt.com> 17 Januari 2020

Syamsuddin Ramadhan, ”BaitulMal” (On-line), tersedia di :<https://syamsuddinramadhan.wordpress.com> (2 Maret 2020)